

PERAN KELUARGA ASUH TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENGASUHAN MELALUI OPTIMALISASI PERAN KAKAK ASUH TARUNA

Oleh Ferli Hidayat

ABSTRAK

Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan dilingkungan Polri diharapkan dapat melahirkan perwira Polri yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin Polri masa depan, sesuai strata kepengkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat. Langkah ini sejalan dengan gagasan Gubernur Akademi Kepolisian untuk mewujudkan Akademi Kepolisian sebagai center of excellent menuju Akpol sebagai World Class Police Academy. Langkah konkret dalam mencapai hal tersebut salah satunya dengan peningkatan kualitas pengasuhan melalui optimalisasi peran kakak asuh dalam kehidupan senior-junior di Akademi Kepolisian. Sebagai sebuah komunitas yang heterogen, pola hubungan senior-junior yang terjadi dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang berbeda, dimana dengan perbedaan tersebut diharapkan dapat membentuk pola hubungan yang bersifat patnership dengan berlandaskan hubungan asah, asih, dan asuh. Penelitian ini sendiri dibuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan metode pencarian data melalui observasi langsung dan wawancara. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan taruna dalam komunitas keluarga asuh seringkali berbenturan dengan kelompok kedaerahaan yang ada di Akpol. Kelompok kedaerahaan tersebut tanpa disadari menciptakan aturan internal dengan sifat hirarki yang lebih keras. Simpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program keluarga asuh berjalan sesuai dengan apa yang digariskan pimpinan Polri dalam membentuk pola hubungan senior-junior di Akpol. Kelompok keluarga asuh dapat membawa taruna kedalam komunikasi yang efektif dengan latarbelakang hubungan emosional yang positif.

Kata kunci: keluarga asuh, kualitas pengasuhan, optimalisasi peran, kakak asuh

A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi menetapkan strategi Polri dalam jangka panjang yang dikenal dengan *Grand Strategi* Polri yang dimulai pada tahun 2005 sampai 2025. *Grand Strategi* Polri itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan yaitu: “ Tahap I

adalah *Trust Building* (2005-2010) yaitu keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (*trust*). Tahap II adalah *Partnership Building* (2011-2015) yaitu merupakan kelanjutan dari tahap pertama, dimana perlu

1) Ajun Komisaris Polisi Ferli Hidayat,SH.,SIK. Kasattar Tk.III/44 Korbintarsis Akademi Kepolisian

dibangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Tahap III adalah *Strive for Excellence* (2016-2025) yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan” (Keputusan Kapolri Nomor: Kep/37/X/2008).

Pada tahap pelaksanaan, *Grand Strategi* Polri ini akan dijabarkan dalam setiap pelaksanaan tugas Polri disetiap satuan kewilayahan termasuk unsur Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). Hal ini selaras dengan arah reformasi birokrasi Polri yang menekankan pada 3 (tiga) bidang, yakni: (1) Reformasi Struktural; (2) Reformasi Fungsional; dan (3) Reformasi Kultural. Menurut Novel Ali (2010), reformasi instrument (fungsional) dan reformasi struktur yang dicanangkan oleh Polri berjalan dengan cukup baik, dengan berbagai program menonjol diantaranya quick win, quick respon, pelibatan pengawas eksternal, pemberantasan *extra ordinary crime*, penataan birokrasi Polri dan lain sebagainya. Namun untuk reformasi dibidang kultural dirasa masih jauh dari harapan masyarakat (Komisi Hukum Nasional 2010:4).

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin komplek

menuntut pembangunan institusi Polri untuk semakin mengutamakan nilai-nilai dan kapabilitas dalam keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi, berkualitas berbasis teknologi dan pengetahuan mutakhir. Untuk mewujudkan hal tersebut selain merubah kultur anggota Polri juga merubah seluruh komponen yang mendukung tugas tersebut. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan yang mencetak anggota Polri dimasa depan.

Akademi Kepolisian sebagai satu-satunya lembaga pendidikan pembentukan Polri sumber SMA, memiliki tugas untuk mendidik taruna-taruni sebagai calon-calon perwira Polri yang nantinya akan bertugas menjadi pimpinan Polri di masa depan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Akademi Kepolisian memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Visi Akpol adalah “Terwujudnya lembaga pendidikan pembentukan perwira Polri yang berkualitas, untuk melahirkan perwira Polri yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin Polri masa depan, sesuai strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat”. Sedangkan misi Akademi Kepolisian adalah :

- (1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, pelatihan dan pengasuhan yang berkualitas dalam

rangka membentuk perwira Polri yang berkemampuan sebagai *first line supervisor* yang cerdas spiritual, intelektual emosional, sehat jasmani, tangguh, berwibawa, berjiwa pemimpin dan unggul berdasarkan jati-diri Bhayangkara.

(2) Meningkatkan mutu latihan kerja taruna dalam rangka pengabdian masyarakat sesuai pelaksanaan tugas pokok Polri.

(3) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan belajar mengajar dan pelatihan taruna.

(4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 10 komponen pendidikan Akademi Kepolisian.

(5) Menyelenggarakan manajemen sumber daya Akademi Kepolisian secara bersih, transparan dan akuntabel.

(6) Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan akademi TNI, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan Kepolisian di dalam maupun luar negeri (<http://akpol.Ac.id>).

Tugas Akademi Kepolisian dalam mencetak perwira Polri yang sesuai dengan visi dan misi tersebut bukanlah sebuah hal yang mudah. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di kampus Akademi Kepolisian menunjukkan belum terlaksananya reformasi kultural di Akademi Kepolisian secara optimal.

Pada tahun 2006, terjadi kasus pemukulan terhadap Hendra Saputra yang dilakukan oleh seniornya (<http://www.antaranews.com>) atau juga kasus yang menimpa Tri Pramuda Siburian yang dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri (<http://superkoran.info>).

Pasca kejadian tersebut, Akademi Kepolisian melakukan berbagai pembenahan khususnya dibidang pengawasan kepada peserta didik dalam hal ini taruna Akademi Kepolisian. Pembenahan ini dilaksanakan dengan disertai pemberian *punishment* (ganjaran negatif) terhadap pelaku kekerasan yang diwujudkan dalam peraturan kehidupan taruna (Perduptar Akademi Kepolisian, Skep Gubernur Akpol No.Pol.: SKEP/31/III/2008 tanggal 31 Maret 2008). Peraturan tersebut berjalan selaras dengan peraturan tentang Pedoman Penilaian Sikap dan Perilaku Taruna Akpol (Skep Gubernur Akpol No.Pol.:SKEP/64/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Herman (2012) menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka kekerasan di Akademi Kepolisian yang dilaporkan kepada bagian Provost Akademi Kepolisian sebagai dampak dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pengasuh Akademi Kepolisian serta pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*) dikampus

Akademi Kepolisian (Herman 2012: 69). Pencapaian tersebut memang diikuti dengan kesamaan pandangan dari para pengasuh taruna mengenai pola tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para taruna sesuai dengan Perduptar Akademi Kepolisian.

Pada awal tahun 2012 ini, pimpinan Akademi Kepolisian dalam hal ini Gubernur Akpol telah mencaangkan program strategis dalam mewujudkan Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Akademi Kepolisian sebagai *center of excellence* menuju Akademi Kepolisian sebagai *World Class Police Academy*. Proyeksi dari pencapaian program ini ditopang pada 4 (empat) pilar *Performance Excellence*, yaitu : (1) Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan pengasuhan; (2) Peningkatan kualitas pengendalian sistem pendidikan, pembentukan, dan pengasuhan; (3) Peningkatan infrastruktur dan fasilitas belajar-mengajar; dan (4) Peningkatan kapasitas sumberdaya.

Pilar pertama, khususnya pada bidang peningkatan kualitas pengasuhan, revitalisasi peran 'kakak asuh' dan optimalisasi peran pengasuh sebagai pembimbing mental dan akademik mendapatkan porsi yang lebih besar sebagai sebuah program unggulan. Dimana peran 'kakak asuh' diharapkan dapat

mengubah paradigma 'senior-junior' dalam arti negatif menjadi sebuah hubungan yang sifatnya positif. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan upaya menghilangkan budaya kekerasan yang pernah terjadi di Akademi Kepolisian. Dari latar belakang permasalahan yang diutarakan di atas, penulis mencoba mengerucutkan penelitian ini menjadi beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan peran ' kakak asuh' dalam kegiatan taruna di Akademi Kepolisian?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan keluarga asuh dalam kehidupan korps Taruna Akademi Kepolisian?

B. LANDASAN TEORETIS

Pada bagian ini, penulis menguraikan beberapa teori dan konsep yang akan digunakan dalam membedah permasalahan yang ada di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kelompok Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok sosial didefinisikan sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Robert Merton (1967) lebih mendefinisikan kelompok sosial sebagai "*a number of people who interact with one another in*

accord with established patterns" (1990:45). Lebih lanjut Merton mengungkapkan bahwa syarat dari kelompok sosial adalah : a) memiliki pola interaksi; b) pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok; dan c) pihak yang berinteraksi didefinisikan orang lain sebagai anggota kelompok.

2. Teori Kontrol dan Pengekangan

Menurut Albert J Reiss (1951) seperti dikutip dari Ronald L. Akers. (2006 : 150) "Penyebab terjadinya kejahatan adalah kegagalan pada kontrol pribadi dan kontrol sosial. Kontrol pribadi ada dalam diri, sementara kontrol sosial bekerja melalui penerapan eksternal dari sanksi-sanksi sosial legal dan informal". Menurut Nye (1958) seperti dikutip Romli (1992:33) terdapat 4 (empat) tipe kontrol sosial yaitu : a) Kontrol langsung, dimana hukuman dijatuhkan atau diancamkan untuk perbuatan jahat dan kerelaan diberikan oleh para orang tua; b) Kontrol tak langsung, dimana seorang remaja menahan diri dari kejahatan karena perbuatan jahatnya bisa mengakibatkan perasaan sakit dan kekecewaan orang tua atau yang lainnya dengan siapa mereka berhubungan dekat; c) Kontrol internal, dimana hati nurani atau perasaan bersalah para remaja mencegahnya terlibat dalam per-

buatan jahat; dan d) Ketersediaan sarana alternatif untuk mencapai nilai dan tujuan.

3. Konsep Keluarga Asuh Resimen

Keluarga asuh resimen adalah salah satu bentuk tradisi taruna Akademi Kepolisian yang menjadi wadah interaksi diantara taruna senior dengan taruna junior. Dari seluruh taruna Akademi Kepolisian yang ada dibentuk kelompok-kelompok kecil dan memiliki identitas sendiri-sendiri. Layaknya sebuah keluarga, kelompok tersebut menciptakan hubungan abang dan adik yang akan terus dibawanya sampai kapanpun. Sebuah keluarga asuh memiliki unsur : a) *sodara asuh*, yakni taruna dari satu angkatan yang sama; b) *kakak asuh*, yakni taruna junior (tk.I) terhadap taruna senior (tk.II); c) *mbah mentor*, yakni taruna senior (tk.III) terhadap taruna junior (tk.I); dan d) *buyut mentor*.

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang seluas-luasnya mengenai peranan keluarga asuh dalam kehidupan sehari-hari taruna Akademi Kepolisian. Kemudian metode yang digunakan adalah evaluasi program secara deskriptif

eksploratif. Program dimaksud adalah kebijakan Gubernur Akademi Kepolisian dalam upaya peningkatan kualitas pengasuhan melalui optimalisasi peran kakak asuh taruna.

Data yang digunakan dalam analisis bersumber pada data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan sumber data lapangan dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang ada khususnya mengenai berbagai peraturan lingkungan Akademi Kepolisian. Melalui analisis data yang dilakukan, penulis mengharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai peran keluarga asuh di Akademi Kepolisian dalam meningkatkan kualitas pengasuhan diantara taruna senior dengan taruna junior, termasuk hubungan kakak asuh.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menggabungkan temuan penelitian menjadi satu dengan pembahasan yang akan menjawab pokok permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Temuan dalam penulisan ini diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan jajaran internal Akademi Kepolisian dan observasi kepada kegiatan taruna Akademi Kepolisian dengan disertai telaah dokumen pada

beberapa materi penulisan.

Pembahasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada khususnya dalam hal peningkatan kualitas pengasuhan dalam mencapai Akademi Kepolisian sebagai *center of excellence*. Hal ini menjadi sangat esensial dalam melihat pelaksanaan program strategis Gubernur Akademi Kepolisian dalam mewujudkan Akademi Kepolisian menuju *World Class Police Academy*.

1. Pelaksanaan Peran 'Kakak Asuh' dalam Kegiatan Taruna di Akademi Kepolisian

Di Akademi Kepolisian saat ini, terdapat 1005 taruna dan taruni yang sedang melaksanakan pendidikan pembentukan perwira Polri. Taruna dan taruni tersebut meliputi taruna tingkat I, taruna tk.II, dan taruna tk.III. Secara jelasnya komposisi taruna dan taruni tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.

Data Taruna Akademi Kepolisian

NO	TARUNA/I	Den TK. III/44	Den TK. II/45	Den TK. I/46
1	TARUNA	273	246	351
2	TARUNI	42	49	44
JUMLAH		315	295	395

(Sumber : Korbintarsis Akpol 2012)

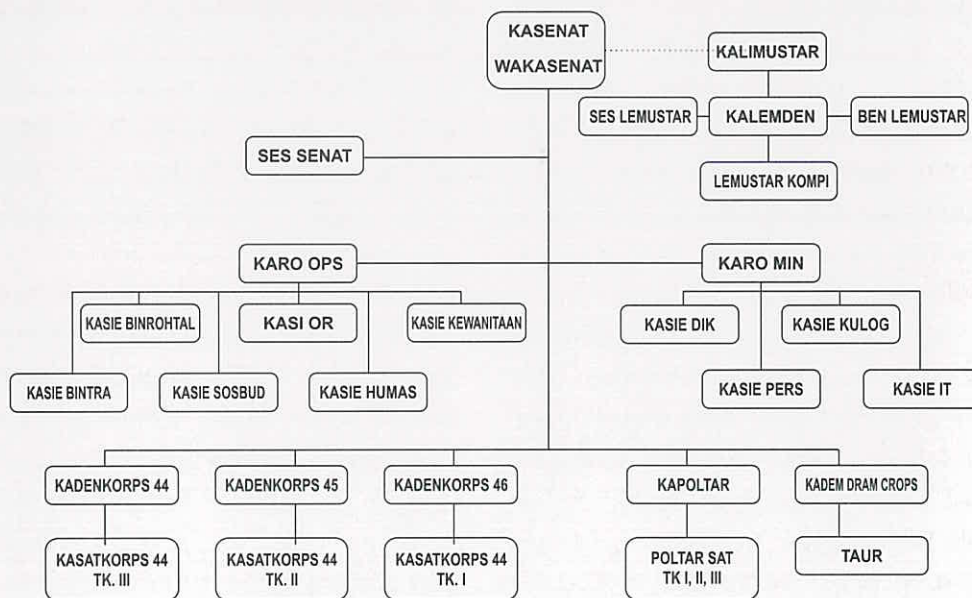
Dalam kesehariannya, di antara para taruna terjalin komunikasi tidak hanya sebatas dengan rekan satu

angkatannya saja, namun juga terjadi komunikasi dan interaksi diantara taruna beda angkatan. Komunikasi dan interaksi yang terjadi inilah yang seringkali memberikan dampak negatif dengan terjadinya budaya kekerasan diantara taruna yang lebih senior kepada taruna juniornya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi budaya kekerasan diantara rekan satu angkatan taruna itu sendiri.

Pada internal kehidupan taruna, terdapat organisasi yang mewadahi kehidupan taruna Akademi Kepo-

lisian yang dikenal dengan nama Senat Korps Taruna. Senat Korps Taruna merupakan organisasi Ke-Tarunaan yang bersifat resmi, dibentuk dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian yang berguna dalam menampung aspirasi dan kreatifitas taruna sekaligus sebagai sarana berlatih kepemimpinan dan mengembangkan kemampuan berorganisasi.

Secara jelas, struktur organisasi Senat Koprs Taruna digambarkan melalui gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Senat Korps Taruna

(Sumber : Senat Korps Taruna 2012)

Organisasi Senat Korps Taruna ini dipimpin oleh taruna tk. III, demikian pula untuk seluruh unsur kelompok komando juga dijabat oleh taruna tk. III. Taruna junior hanya menduduki

jabatan Poltar (Polisi Taruna) dan Lemustar (Lembaga Musyawarah taruna) pada tingkat kompi atau satuan masing-masing.

Pada struktur di atas, dapat

dilihat bahwa taruna senior memiliki kewenangan dalam memimpin taruna junior, terutama bagi para kelompok komando. Artinya, terdapat interaksi langsung yang terjadi di antara para Kasatcorp (Kepala Satuan Korps Taruna) dengan satuan yang dipimpinnya langsung. Hubungan interaksi ini membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari Kasatcorp kepada satuannya khususnya pada satuan taruna tk.I dan tk.II yang memiliki Kasatcorp yang berasal dari taruna tk.III.

Kewenangan tersebut memang dibatasi dengan adanya peraturan kehidupan taruna (Perduptar Akpol) serta pengawasan pengasuh taruna, dimana para pengasuh tersebut merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai Kasattar (Kepala Satuan Taruna). Para Kasattar ini merupakan pengasuh langsung dari taruna Akademi Kepolisian, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian untuk melaksanakan tugas pembinaan, pengarahannya, pengawasan dalam kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara melekat kepada taruna.

Di samping itu pula, Perduptar Akademi Kepolisian pada Pasal 7 secara lugas memberikan batasan-batasan pada aktivitas hubungan antar sesama taruna, taruna senior dan taruna junior, dan antara taruna

dengan taruni. Hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat kemitraan (*partnership*) saling mendukung dengan berlandaskan asas kekeluargaan melalui prinsip asah, asih, dan asuh yang berpedoman pada etika dan hirarki. Pada penerapannya, pasal ini diikuti dengan sanksi yang tegas bagi semua taruna yang melakukan pelanggaran atau melanggar batasan ketentuan pada pasal ini.

Kemudian dari hasil observasi penulis, dilingkungan Akademi Kepolisian juga dikenal adanya kegiatan yang menjadi tradisi korps taruna. Tradisi ini merupakan budaya turun temurun dan telah menjadi sebuah kebiasaan. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi 'keluarga asuh resimen'. Tradisi ini memiliki makna sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sifat asah, asih dan asuh antara Taruna senior dan Taruna junior dengan membentuk suatu ikatan Keluarga Asuh yang terdiri dari Taruna Tk IV, Tk III dan Tk II. Hal ini diharapkan ikatan keluarga asuh ini dapat menjalin komunikasi antara Taruna senior dan Juniornya apabila ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian, dan secara luas bisa diteruskan / dilanjutkan pada saat berdinasnya nanti bahwa pemilihan Kakak asuh dan adik asuh merupakan acara tradisi yang mempunyai

maksud agar lebih menjalin rasa kekeluargaan dan kekerabatan antara Taruna Senior dengan taruna Junior

b. Pemilihan kakak Asuh dan adek

Asuh diharapkan dapat menjadi suatu kegiatan yang positif sehingga dapat mengurangi suatu tindakan-tindakan kekerasan dari Taruna Senior

c. Dengan diadakannya Tradisi pemilihan Kakak Asuh dan Adek Asuh dapat menimbulkan kepedulian seorang taruna senior kepada Junior dan juga dapat menumbuhkan sikap Respek dan Loyalitas seorang Taruna Junior kepada taruna senior.

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal masa pendidikan taruna (Cab-hatar), dibawah tanggung jawab Ketua Senat Korps Taruna. Dalam kegiatan ini, taruna senior akan dipertemukan dengan taruna junior sehingga setiap taruna senior mendapatkan satu atau dua orang taruna junior sebagai adik asuhnya. Kemudian para adik asuh tersebut akan mengikuti nama keluarga asuh yang dimiliki atau sesuai dengan keluarga asuh dari kakak asuhnya langsung.

Saat ini di Akademi Kepolisian, terdapat sekurangnya 23 keluarga asuh dengan jumlah yang tidak sama pada setiap keluarga asuh tersebut. Hubungan antara keluarga asuh ini menciptakan sebuah *in-group* yang secara langsung memberikan pengaruh kepada taruna yang menjadi ba-

gian dari *in-group* tersebut. Menurut Soekanto (2002), sikap *in-group* biasanya didasari pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggotanya, seperti halnya yang terjadi pada keluarga asuh di Akademi Kepolisian.

Pelaksanaan peran 'kakak asuh' itu sendiri memiliki intensitas pertemuan yang cukup tinggi, baik berupa interaksi yang dijadwalkan maupun yang tidak dijadwalkan. Dari hasil penelusuran penulis, implementasi kegiatan kakak asuh ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Temu Kakak Asuh di Lingkungan Korps Taruna

a. Makan bersama saudara asuh

Kegiatan ini dijadwalkan untuk dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu minggu dimana dalam pelaksanaannya diharapkan taruna senior yang berkedudukan sebagai kakak asuh dapat memberikan transfer ilmu/informasi seperti : 1) senior memberi contoh cara makan yang baik sesuai perdupstar dan norma yang berlaku di masyarakat; 2) senior memperkenalkan diri dan mengenalkan para pejabat di lingkungan Akpol; 3) senior mengarahkan adik asuhnya mengenai kehidupan didalam Senat Koprps Taruna Akademi Kepolisian.

B. Bertemu saudara asuh di café Taruna; 1) senior mengecek kondisi kesehatan adik asuhnya

maupun keluarganya; 2) senior mengecek kesulitan Taruna junior dan membantu mencari solusi jalan keluarnya; 3) senior mengarahkan kebutuhan-kebutuhan mengenai perlengkapan pribadi yang perlu disiapkan;

c. Bertemu kakak asuh di flat;

1) senior mengecek mata pelajaran yang dianggap sulit diterima oleh adik-adik asuhnya; 2) senior memberi referensi pelajaran kepada adik asuhnya; 3) senior melakukan diskusi singkat tentang materi pelajaran yang akan diujikan dosen; 4) senior memberikan kesempatan kepada junior untuk menanyakan mata pelajaran yang dianggap kurang dimengerti; 5) senior memberikan motivasi belajar kepada adik asuhnya.

d. Forum Diskusi Keluarga asuh

Forum ini tidak lebih mengarah pada sharing informasi antara senior dengan junior, tidak hanya sebatas pada adik asuh dan kakak asuhnya namun juga diantara keluarga asuh yang menjadi saudara asuhnya.

2. Temu Kakak Asuh di Luar Lingkungan Korps Taruna;

a. Pesiari bersama kakak asuh ke pos pesiar; 1) senior mengajak pesiar adik asuh ke tempatnya (pos pesiar); 2) senior membimbing dan mengarahkan etika pada saat pesiar sesuai perdupkar; 3) senior memberi contoh ketauladanan dalam bertindak dan

berperilaku saat pesiar; 4) senior memberi contoh tauladan dalam bergaul dengan sesama Taruna dan masyarakat; 5) senior memperkenalkan keluarga, kerabat, kenalannya kepada adik asuhnya; 6) senior membantu memfasilitasi kebutuhan yang mendukung pembelajaran di Akpol kepada Taruna junior pada saat pesiar.

b. Kunjungan bersama kakak asuh ke tempat/rumah para pejabat Akademi Kepolisian

c. Kunjungan bersama kakak asuh ke kediaman pejabat diluar Akademi Kepolisian

D. Kegiatan lain seperti foto bersama keluarga asuh dan makan bersama keluarga asuh pada saat jam/waktu pesiar.

Namun demikian, pelaksanaan peran kakak asuh di Akademi Kepolisian ini tidak semata berdampak positif, melainkan pula menghasilkan dampak negatif. Dari hasil pengamatan penulis, keberadaan *in-group* ini membuka peluang munculnya sifat *ethosentrisme* dari individu dalam sebuah kelompok keluarga asuh. Kecenderungan yang terjadi adalah persaingan diantara para keluarga asuh, sebagai akibat tidak adanya kontrol sosial. Selaras dengan pendapat Polak (1996) yang menyatakan bahwa perasaan *in-group* dan *out-group* dapat menjadi dasar suatu sikap yang dinamakan

ethnosentrisme.

Perasaan kebanggaan yang berlebihan pada kenyataannya menyebabkan para taruna seringkali menganggap remeh keberadaan keluarga asuh yang lain, yang sebenarnya juga memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga asuhnya sendiri. Perasaan tersebut pada satu titik tertentu tidak semata menghasilkan pertentangan, namun juga bisa berujung pada konflik terutama jika dilibatkan dengan kedudukan taruna senior. Para taruna senior cenderung untuk membela/melindungi para adik asuhnya pada saat senior dari keluarga asuh yang lain memberikan hukuman, sekalipun kesalahan ada pada adik asuh tersebut.

Kemudian, hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa sebuah keluarga asuh akan merasa lebih bangga jika didalam keluarga asuhnya tersebut terdapat taruna senior yang menduduki jabatan di Senat Korps Taruna. Kondisi ini memunculkan benturan akan sebuah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Hal ini memunculkan sebuah gap diantara keluarga asuh-keluarga asuh yang ada di Akademi Kepolisian. Karena perasaan kebanggaan tersebut secara sadar maupun tidak sadar akan diturunkan dari taruna senior kepada adik-adik asuhnya yang menjadi taruna junior dan seterusnya. Pada satu sisi, perasaan

ini akan memunculkan motivasi positif bagi taruna junior yakni perasaan kebanggaan yang membuat dirinya akan selalu menjaga nama baik keluarga asuhnya, namun jika tidak dikontrol maka akan menghasilkan perasaan *ethnosentrisme* yang berujung pada konflik.

Kondisi ini bisa lebih diperparah, jika kelompok keluarga asuh ini dibenturkan dengan kelompok lain seperti kelompok Senat Korps dan kelompok Kedaerahan (Korp Daerah). Padahal, korps kedaerahan memiliki ikatan yang kuat karena tercipta berdasarkan kesamaan budaya dan dengan intensitas pertemuan yang lebih sering jika dibandingkan dengan keluarga asuh, hal ini dikarenakan :

1. Korps Kedaerahan muncul sebagai akibat dari kesamaan wilayah pendaftaran pada saat melaksanakan tes masuk menjadi taruna, artinya kelompok ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan keluarga asuh.
2. Korps kedaerahan melibatkan peran keluarga taruna, karena para keluarga biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain.
3. Korps kedaerahan memiliki intensitas berkomunikasi yang cukup tinggi dan ini ditunjukkan dengan kecenderungan taruna pada saat makan di ruang makan taruna,

dimana posisi duduk taruna senior tersusun dan mengelompok berdasarkan asal daerah. Hal ini juga telah berlangsung lama dan menjadi tradisi turun temurun.

4. Keberadaan pos pesiar taruna lebih cenderung berdasarkan asal daerah, misalnya pos pesiar koprs Jawa Barat, pos pesiar korps Sumbagsel, pos pesiar korps Jawa Timur dan seterusnya.

5. Keberadaan korps taruna itu sendiri dilegalkan secara tidak langsung dalam Perduptar Akademi Kepolisian, Pasal 26 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa taruna diperbolehkan melaksanakan tradisi korps kedaerahan yang positif. Pasal ini menunjukkan bahwa keberadaan korps kedaerahan itu diakui oleh Akademi Kepolisian dan pada kenyataannya memang acara korps kedaerahan itu sering dilaksanakan oleh para taruna ketika mereka cuti kembali ke daerahnya masing-masing.

Peningkatan kualitas pengasuhan dengan mengedepankan program 'kakak asuh' pada kenyataannya masih menyisakan permasalahan yang harus segera diperbaiki. Peranan Senat Koprs Taruna sebagai sebuah organisasi resmi yang dimiliki oleh taruna seharusnya bisa menjadi penetralisir sifat-sifat etnosentrisme yang muncul. Karena keadaan tersebut akan terus menciptakan peluang

terjadinya konflik diantara para taruna khususnya diantara taruna senior. Penulis sendiri berpendapat bahwa situasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Interaksi diantara adik asuh dan kakak asuh yang ada saat ini, tidak diikuti dengan interaksi bersama yang melibatkan seluruh keluarga asuh. Artinya, tidak ada hubungan emosional yang dibentuk antara keluarga asuh yang satu dengan yang lain. Diharapkan dengan interaksi tersebut bahwa jiwa kebersamaan diantara keluarga asuh-keluarga asuh yang ada akan terjaga sehingga rasa kebanggaan terhadap keluarga asuhnya tidak akan melebihi rasa kebanggaan secara satu kesatuan sebagai taruna Akademi Kepolisian.

2. Interaksi keluarga asuh ini tidak melibatkan peran pengasuh secara langsung, padahal sebagian besar pengasuh yang ada adalah alumni Akademi Kepolisian yang juga merupakan bagian dari keluarga asuh tersebut.

3. Keberadaan korps kedaerahan yang tidak dikontrol, padahal intensitas interaksi koprs kedaerahan yang sering terjadi. Hal ini dibuktikan dari posisi duduk di ruang makan dimana taruna senior duduk mengelompok sesuai dengan korps daerahnya, pos pesiar yang ada adalah pos pesiar berdasarkan daerah, kegiatan-kegiatan kedaerahan yang

selalu ada ketika taruna cuti (diluar kampus Akpol).

Berdasarkan hal tersebut, ketika seorang taruna junior dibenturkan pada dua kepentingan yakni kepentingan akan kelompok keluarga asuh dan kepentingan akan kelompok kedaerahan, maka taruna junior akan lebih memilih kepentingan akan kelompok korps kedaerahan. Kelompok kedaerahan selain muncul akibat adanya persamaan asal daerah (budaya), disamping itu juga kelompok korps kedaerahan ini tercipta secara informal namun memiliki kekuatan pengikat yang cukup kuat.

Kasus pemukulan terhadap Hendra Saputra pada tahun 2006 membuktikan bahwa eksistensi keberadaan korps kedaerahan tidak bisa diabaikan begitu saja. Korps kedaerahan memiliki pos pesiar yang sama antara taruna senior dengan taruna junior (kecuali taruni), dan jauh dari kontrol pengasuh. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana aturan diantara taruna yang berasal dari daerah yang sama adalah nyata. Kendati terbentuk secara informal namun kelompok sosial itu dapat disadari telah memiliki aturan (kontrak sosial) yang membuka peluang pada terjadinya kekerasan diluar kampus Akademi kepolisian. Selain kasus tersebut, masih banyak peluang terciptanya budaya kekerasan diantara taruna seperti

misalnya pelaksanaan acara-acara paguyuban keluarga taruna ketika para taruna melaksanakan cuti kembali kedaerahnya.

Karena itu penulis berkesimpulan bahwa keberadaan kelompok kedaerahan ini juga perlu dilakukan pembinaan intensif dan tidak bisa diabaikan dengan meningkatkan intensitas peran keluarga asuh. Karena kenyataannya, kelompok korps kedaerahan itu terlahir lebih dulu dan memiliki intensitas pertemuan yang lebih sering. Sehingga interaksi sosial diantara kelompok korps kedaerahan dan kelompok keluarga asuh dapat berjalan dengan selaras serta pada koridor hubungan senior-junior yang bersifat kekeluargaan dengan didasari perasaan asah, asih, dan asuh. Sedangkan dalam menjembatani keberadaan kelompok-kelompok tersebut, peranan Senat Korps Taruna masih dianggap belum signifikan terutama dalam mencegah terjadinya konflik diantara taruna yang berbeda asal daerah maupun yang berbeda keluarga asuhnya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Keluarga Asuh Dalam Kehidupan Korps Taruna Akademi Kepolisian

Dalam melihat faktor yang mempengaruhi keberadaan keluarga asuh di Akademi Kepolisian, penulis

membagi menjadi dua bagian yakni sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung memberikan kontribusi langsung bagi keberadaan keluarga asuh dalam menciptakan hubungan kakak asuh-adik asuh diantara para taruna Akademi Kepolisian, yaitu

a. Pola Hubungan Senior-Junior

Hubungan senior-junior di dalam kehidupan taruna Akpol didasarkan pada bentuk hubungan kekeluargaan yaitu menerapkan hubungan kakak asuh dan adik asuh dalam keluarga asuh, dimana penerapan menggunakan pola asah, asih, asuh yang bertujuan untuk mengarahkan, membimbing, melatih, mendidik dan membina taruna junior agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan lancar dalam usahanya mencapai tujuan utama yaitu lulus dan dilantik menjadi perwira Polri.

Ikatan kakak asuh dan adik asuh dalam keluarga asuh ini merupakan suatu bentuk pembelajaran pengorganisaian informal yang ada didalam lembaga pendidikan. Kewajiban membina junior oleh taruna senior di Akpol sesuai Perdupstar harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Akpol. Tindakan pembinaan yang menggunakan kekerasan yang terjadi turun-temurun adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Perdupstar. Karena itu bentuk peran kakak asuh terhadap

adik asuhnya dapat menciptakan terwujudnya pola hubungan kekeluargaan yang dilandasi prinsip asah, asih, dan asuh

b. Interaksi Alumni Akademi Kepolisian

Keberadaan keluarga asuh yang merupakan tradisi Senat Korps Taruna dan dilaksanakan secara turun temurun memberikan pengaruh yang besar pada hubungan taruna dengan kakak asuhnya yang sudah terlebih dahulu lulus dari Akademi Kepolisian. Kakak asuh tersebut tidak hanya sebatas pada kakak asuh yang ada di Akademi Kepolisian, namun juga melibatkan semua kakak asuhnya yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya. Perasaan kebersamaan ini akan memunculkan dampak positif pada suasana kerja maupun suasana emosional diantara alumni yang menjadi bagian dari keluarga asuh tersebut.

Namun demikian, dampak dari interaksi ini lebih terasa manfaatnya ketika taruna tersebut telah lulus dari Akademi Kepolisian dan berdinis disebuah satuan kewilayahan dan bertemu dengan kakak asuhnya baik langsung ataupun kakak asuh dalam keluarga asuh. Tidak sedikit pula para alumni yang ketika berkunjung ke Akademi Kepolisian ikut mengumpulkan/berkesempatan bertatap muka dengan keluarga asuhnya langsung.

Faktor penghambat tercipta baik dari internal lingkungan Akademi Kepolisian maupun dari eksternal Akademi Kepolisian, yaitu

a. Kontrol Sosial Yang Lemah

Kontrol sosial disini lebih mengarah kepada bentuk pengawasan dari pengasuh taruna Akademi Kepolisian. Pengawasan utamanya adalah pengawasan terhadap aktivitas keluarga asuh tersebut, dimana kecenderungan yang ada adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keluarga asuh yang dilaksanakan oleh taruna. Sehingga bentuk-bentuk penyimpangan dan konflik yang muncul dan akan muncul tidak bisa deteksi secara dini. Termasuk diantaranya apabila terjadi benturan antara kepentingan kelompok keluarga asuh dengan kepentingan korps kedaerahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

b. Sifat Premodialisme Berlebihan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keberadaan korps kedaerahan membawa pengaruh pada terhambatnya program 'kakak asuh' ini. Karena pada kenyataannya benturan yang ada tidak diimbangi dengan pola hubungan pembinaan diantara korps yang ada. Ketika seorang taruna lebih bangga terhadap korps kedaerahan maka keberadaan keluarga asuh dapat dengan mudahnya diabaikan. Kebanggaan ini selain

muncul karena kesamaan budaya diantara taruna juga dapat dikarenakan adanya 'paksaan' dari taruna senior kepada taruna juniornya.

Situasi ini menciptakan pada terjadinya budaya kekerasan yang disebabkan karena adanya aturan yang muncul dalam ikatan kelompok kedaerahan tersebut. Taruna senior masih cenderung untuk memberikan tekanan kepada juniornya yang berasal dari satu daerah, dimana hal ini tidak terjadi pada pola hubungan antara kakak asuh dengan adik asuh. Artinya, ikatan kedaerahan memunculkan adanya sikap arogansi senior kepada juniornya, karena tidak dilandasi dengan semangat kekeluargaan yang berprinsip pada sifat asah, asih, dan asuh diantara para taruna. Kemudian pengawasan terhadap perkembangan korps kedaerahan yang sangat lemah memungkinkan hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama dan turun temurun menjadi sebuah tradisi yang buruk diantara para taruna.

E. PENUTUP

Peningkatan kualitas pengasuhan melalui optimalisasi peran 'kakak asuh' pada dasarnya merupakan hal yang positif dan dapat membantu para taruna dalam menyelesaikan segala permasalahan yang didapatnya ketika menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian.

Keluarga asuh menciptakan hubungan kekeluargaan yang didasari pola hubungan asah, asih, dan asuh sebagaimana yang diatur dalam Perduptar Akademi Kepolisian. Namun demikian, pelaksanaan ditingkat bawah memungkinkan pada terjadinya penyimpangan-penyimpangan hubungan terutama diantara taruna senior dengan taruna junior. Penyimpangan ini dapat menyebabkan munculnya konflik diantara keluarga-keluarga asuh yang ada. Sehingga dibutuhkan sebuah pengawasan dari pengasuh agar tetap terjaganya hubungan emosional yang positif diantara seluaruh taruna yang ada di Akademi Kepolisian.

Kelangsungan keluarga asuh ini juga tidak lepas dari faktor pendukung yang dapat mendorong munculnya eksistensi keluarga asuh dengan tanpa memunculkan konflik diantara keluarga asuh yang ada. Diantaranya adalah pola hubungan senior-junior yang ada di Akademi Kepolisian adalah pola hubungan yang berdasarkan rasa kekeluargaan yang dilandasi sifat asah, asih, dan asuh diantara para taruna. Pola hubungan ini juga diikuti dengan adanya sanksi yang tegas ketika terjadi pola hubungan yang menyimpang terutama mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan taruna. Selain itu, keberadaan alumni Akademi Kepolisian juga memungkinkan pada terciptanya rasa keber-

samaan karena dilandasi dengan perasaan sebagai satu keluarga asuh. Namun disamping itu, terdapat pula faktor yang menghambat keberadaan keluarga asuh ini, diantaranya adalah kontrol sosial yang lemah serta perasaan premodialisme yang berlebihan yang muncul dalam korps kedae-
rahan.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mencoba memberikan beberapa saran terkait dengan pelaksanaan program keluarga asuh yang berlangsung di Akademi Kepolisian, yaitu :

a. Pelaksanaan program Keluarga

Asuh hendaknya dilaksanakan dengan melibatkan peran pengasuh taruna secara langsung sesuai dengan kelompok keluarga asuh dari para pengasuh itu sendiri.

b. Perlu dilaksanakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan seluruh keluarga asuh, seperti pelaksanaan lomba antara keluarga asuh, sehingga memunculkan persaingan positif diantara seluruh keluarga asuh, karena kedudukan keluarga asuh yang ada saat ini adalah setara dan sama derajatnya.

c. Mengsinergikan peranan keluarga asuh dengan kelompok korps daerah dalam setiap aktivitas keluarga asuh dalam arti tidak meninggalkan peranan korps daerah sehingga kedudukan korps daerah tidak menjadi lebih penting dari kedudukan kelompok keluarga asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred J. Tilukay. 2010. *Pengaruh Pengawasan Pengasuh Dan Self Control Taruna Terhadap Perilaku Agresif Taruna Akademi Kepolisian*. Skripsi, Mahasiswa Angkatan 55, Jakarta
- Herman, Dedy. 2012. *Efektivitas Pengawasan Pengasuh Dalam Upaya Menghilangkan Tradisi Kekerasan dalam Kehidupan Taruna Akpol*. PTIK.
- Hesti Lestari. 2012. *Sosiologi*. Akpol.
- Komisi Hukum Nasional. 2010. *Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum 2010*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Senat Korps Taruna Akpol. 2012. *Buku Tradisi Taruna*, Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Akpol.ac.id. 2012. Visi dan Misi Akpol. [Http://akpol.ac.id/baru/index.php?option=com](http://akpol.ac.id/baru/index.php?option=com), 26 Mei 2012.
- Antaraneews.com. Tanpa Tahun. Seorang Taruna Akpol Gegar Otak Disiksa Senior. [Http://www.antaraneews.com/berita](http://www.antaraneews.com/berita)
[Http://superkoran.info/forums/viewtopic.php?f=1&t=48794](http://superkoran.info/forums/viewtopic.php?f=1&t=48794)

